

Aktor Intelektual Bansos Diburu

SEMARANG - Kejati Jateng terus menyelidiki kasus penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD Jateng. Setelah menetapkan tiga tersangka dari pejabat pemprov, kini juga memburu aktor intelektual dari penyaluran bansos tersebut.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Masyhudi mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan ditemukan tersangka baru. "Penyidikan akan terus berkembang dan sampai tuntas. Siapa aktor intelektualnya. Penerima dana bansos ribuan. Kalau proposal yang diajukan benar, digunakan sesuai maka tidak masalah. Tapi jika fiktif dan dipotong bisa jadi masalah," kata dia di kantornya, Rabu (29/1).

Dikatakan, belum diketahui dari unsur mana aktor intelektual yang dimaksud. Namun siapapun yang terlibat dan berperan dalam korupsi bansos, akan ditindak dan diproses sesuai hukum. "Yang jelas, aktor intelektual dan siapa saja yang sangat-sangat berperan

Bersambung ke hal 7 kol 3



Aktor

(Sambungan hlm 1)

dalam korupsi ini akan diproses hukum. Apakah dia membuat proposal fiktif atau memotong dana bansos," kata Masyhudi.

Ditegaskan Masyhudi, persoalan bansos, melibatkan sejumlah pihak dan proses tak mudah. Menurut dia, keterlibatan sejumlah pihak lain, dalam kasus itu dimungkinkan terjadi. Untuk mengungkapnya, pihaknya mengaku masih menyelidiki. "Dimungkinan ada yang lainnya. Kami tidak bisa gegabah dan harus sesuai fakta serta bukti," kata dia

Dalam kasus bansos, Kejati menetapkan tiga tersangka pada tanggal 22 Januari lalu. Ketiga tersangka MY dalam kasus bansos 2010, serta tersangka JM dan JS dalam kasus Bansos 2011, mantan pejabat di bagian Biro Bina Mental Sekda Provinsi Jateng.

Dari informasi, MY adalah Mohamad Yusuf, mantan Kepala Biro Bina Sosial. JM ialah Joko Mardiyanto, mantan Kepala Biro Bina Mental. Sementara JS adalah Joko Suyanto, mantan Ketua Tim Verifikasi. Joko Mardiyanto sendiri, kini diketahui menjadi staf ahli Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. "Ini terus berlanjut. Akan ditelusuri, apa peran mereka (tersangka). Karena dari penyelidikan ditemukan bukti, proposal

fiktif dan pemotongan," ujarnya.

Macam Bansos

Aspidus mengungkapkan, bansos Pemprov Jateng banyak macamnya, di antaranya bina mental dan pendidikan. Terkait kasus dugaan korupsi keduanya yang sedang ditangani, Masyhudi mengaku belum menghitung kerugian negaranya. "Kerugian baru dihitung. Untuk bansos 2010 total dana yang diberikan sekitar Rp 214 miliar. Bansos saat itu diobral dan tersebar di kabupaten/ kota," kata dia didampingi Kasipenkum, Eko Suwarni mengaku, akan berkoordinasi dengan Kejari di daerah terkait penanganan kasus bansos di Jateng.

Terkait kasus itu, Kejati menyatakan akan segera menuntaskan penyidikan dan pengembangan. Terhadap ketiga tersangka, Kejati menyatakan belum memeriksa mereka. "Sementara masih pemeriksaan saksi-saksi. Tersangka belum. Saksi sudah banyak kami periksa," katanya.

Pihak Kejati mengakui, memasuki tahun politik 2014, banyak kepentingan dan rawan terjadi penyimpangan korupsi. "Ini akan diselesaikan sebagai contoh. Karena banyak anggapan tahun ini sebagai tahun politik sehingga banyak kepentingan. Ini (penanganan korupsi bansos) termasuk karya daerah, supaya 2014 tidak

terjadi korupsi," harapnya.

Kasus dugaan korupsi terjadi pada pos anggaran bansos tahun 2010 dan 2011. Dari penyelidikan kejaksaan, ditemukan adanya sejumlah proposal fiktif. Dari sampel, terdapat 112 titik proposal fiktif di Jateng penerima fiktif. Dari jumlah itu, ada sekira 4.000 penerima.

Masyhudi mengungkapkan, beberapa modusnya di antaranya membuat proposal fiktif. Modus lain, proposal bansos dipotong antara 15-20 persen. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2011 pos bansos kemasyarakatan memiliki penyimpangan tertinggi. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng yang menyatakan ada indikasi penyimpangan dana Rp 26,89 miliar. Dana itu disalurkan tanpa disertai pertanggungjawaban memadai.

Selain tanpa LPJ, alamat penerima bansos diketahui banyak yang diduga fiktif. Bahkan dari 208 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas) yang mendapatkan dana bansos, hanya 5 persen yang terdaftar di Badan Kesbangpolinmas Jateng.

Sementara, dugaan adanya aktor intelektual korupsi pada dana bansos Pemprov Jateng yang masih diselidiki Kejati Jateng, diakui masih ada. Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto menegaskan, terkait

penyimpangan bansos 2010 atau 2011 dua pihak dikatakannya patut diduga mengetahuinya. "Yaitu gubernur dan anggota dewan. Gubernur dalam hal ini bertindak menandatangani SK (Surat Keputusan) tentang bansos, sementara anggota dewan yang merekomendasi melalui pengepul dan makelar proposal," kata dia kepada *Wawasan*.

Menurut Eko yang mengaku konsen pada kasus bansos tersebut, indikasi itu didasarkan pada sejumlah pengalaman kasus terdahulu. Di pihak dewan, Eko mengatakan, kewenangan pengelolaan dana bansos masih dimiliki. "Terbukti, kasus bansos terdahulu melibatkan Riza Kurniawan (mantan ketua DPRD Jateng-red), makelar dan pihak lain. Sejak 2008-2012, sepanjang kami amati banyak terjadi kebocoran. Sampai kini, dewan masih berwenang mengelola dana bansos," kata dia.

Terhadap dua pihak yang dianggap sebagai bagian penting, aktor intelektual tersebut, KP2KKN berharap Kejati memanggil dan meminta keterangan mereka. "Harus dimintai keterangan. Kasus bansos merupakan salah satu dari lima kasus besar korupsi di Jateng. Kami harap, satu langkah lagi, Kejati bisa mengungkap, siapa aktor intelektualnya," tegas dia. ■

rdi-yan